

Implementation Of Input Tax Prepopulated Data And Vat E- Spt In Increasing Value Added Tax Reporting Agency Tax Registered At Kpp Pratama Bulukumba

by Rika Solihatun Rustan

Submission date: 25-May-2023 03:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2101493334

File name: plementation_Of_Input_Tax_Prepopulated_Data_And_Vat_E-Spt_In.pdf (881.6K)

Word count: 4842

Character count: 30416

Implementation Of Input Tax Prepopulated Data And Vat E-Spt In Increasing Value Added Tax Reporting Agency Tax Registered At Kpp Pratama Bulukumba

Rika Solihatun
Universitas Muhammadiyah Makassar
rikasolihatun@gmail.com

Agusdiwana Suarni
Universitas Muhammadiyah Makassar
agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id

Rustan
Universitas Muhammadiyah Makassar
rustan@unismuh.ac.id

Keywords:

Prepopulated Tax Data, dan e-SPT

Abstract

Prepopulated Input Tax Data and Electronic Notification Letters (e-SPT) The PNN period is one part of the modernization process of Tax administration, so that taxpayers have the convenience of fulfilling and completing their obligations, so that the fulfillment of their tax obligations can be completed easily in their implementation, and the aim is to create an orderly and transparent tax administration. The purpose of this study is to determine the application of prepopulated input tax data and e-SPT Period of VAT in increasing the value added tax reporting of corporate taxpayers. The method used in this research is descriptive research type. To obtain the necessary data, the authors carried out data collection activities for 2018-2021, by interviewing Mr. Dwi Bagas Widiyanto as the System Administrator or the Data Quality Assurance Section. The results of this study indicate that the application of prepopulated tax data and e-SPT for the VAT period is very effective and efficient at KPP Pratama Bulukumba, it can be seen from the increase in Value Added Tax reporting and the use of the Prepopulated data system and e-SPT for the VAT period which is increasing every year. It is hoped that the Directorate General of Taxes and their regional offices should be able to improve their performance, including by providing counseling about the importance of paying taxes on time, and providing the best services, especially for taxpayers

Kata Kunci

Prepopulated Data Pajak, dan e- SPT

Abstrak

Prepopulated Data Pajak Masukan dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa PNN merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi Perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat terselesaikan dengan mudah dalam pelaksanaannya, dan tujuannya untuk menciptakan administrasi perpajakan yang tertib dan transparan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Penerapan Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT Masa PNN dalam peningkatan pelaporan pajak pertambahan nilai wajib pajak badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan kegiatan pengumpulan data tahun 2018-2021, dengan cara wawancara dengan Bapak Dwi Bagas Widiyanto selaku Administrator Sistem atau Seksi Penjaminan Kualitas Data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prepopulated data pajak dan e-SPT masa PNN sangat efektif dan efisien di KPP Pratama Bulukumba, dapat dilihat dari kenaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan penggunaan sistem Prepopulated data dan e-SPT masa PNN yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Maka diharapkan Direktorat Jendral Pajak dan Kantor wilayahnya, sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya, diantaranya dengan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu, serta memberikan layanan terbaiknya terutama bagi para Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan nasional, baik

domestic maupun luar negeri. Dengan cara melaksanakan pembangunan disegala bidang yang perlu untuk dikembangkan. Dan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian

pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara mendapatkan sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satunya adalah Pajak.

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi "Pajak adalah kontribusi Wajib kepada negara, yang terutang, oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dan seperti yang kita ketahui salah satu fungsi perpajakan yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sehingga diharapkan peran aktif bagi seluruh wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya sangat diharapkan.

Cara untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara nyata, dari pihak yang terkait didalam pelaksanaannya. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan atau menyempurnakan sistem dan mekanisme perpajakan. Bentuk penyempurnaan sistem perpajakan antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Undang-Undang No.36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dan bentuk penyempurnaan mekanisme perpajakan antara lain dengan menyederhanakan prosedur administrative dengan diberlakukannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Yang digunakan untuk semua jenis pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber yang paling utama bagi pendapatan negara, dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dan salah satu tujuan Pajak sendiri adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan publik. Penyaluran pajak, tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak saja (wajib pajak), tapi juga kepada masyarakat yang tidak membayar

pajak. Sebagai wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab, maka sebaiknya membayar pajak secara rutin dan tidak bisa dipungkiri, ada juga masyarakat yang tidak membayarkan pajaknya, bahkan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Berdasarkan survei sementara, ketidakmauan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pajak bagi negara kita. Serta tidak ingin repot dengan prosedur pembayaran pajak, dan adanya rasa ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus, dan berbagai hal lainnya.

Beberapa faktor tersebut mengakibatkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, pelaporan pajak secara terutang, yang mengharuskan wajib pajak melakukan transaksi yang cukup besar, serta harus melampirkan dokumen atau *hardcopy*, dalam jumlah yang cukup banyak pula, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyalin data siwajib pajak. Hal inilah yang mengakibatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), menjadi tertunda dan terhambat. Pelaporan pajak secara manual inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyalinan ulang oleh fiskus. Bukan hanya itu saja, SPT secara manual juga dapat menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan dan kertas.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP), menciptakan perangkat yang canggih serta teknologi, yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Yaitu dengan diadakannya fasilitas prosedur pembayaran melalui penerapan *Prepopulated* Data pajak, Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e- SPT). Suprianto (2020).

Secara umum dijelaskan bahwa system *Prepopulated* adalah system yang menyediakan Data pajak, berdasarkan Database yang telah ada sebelumnya. Dan wajib pajak hanya perlu mengkonfirmasi data

yang telah diinput. Dian Efianti, mengemukakan pendapatnya mengenai Faktur 24 Elektronik atau biasa yang sering kita sebut dengan e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat me 54 i sebuah aplikasi elektronik. Dan didalam peraturan Menteri Keuangan 3 No.181/PMK.03/2007 menyebutkan bahwa e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT, yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Vihayanti (2012) menyatakan bahwa, pemrosesan Data Pajak Masukan setelah penerapan e-SPT lebih efektif dibandingkan sebelum diterapkannya system e-SPT ini.

Aplikasi e-SPT juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan PPN yang disebut 2 dengan e-SPT Masa PPN. Dan pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan pada semua jenis transaksi jual beli, baik barang maupun jasa pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Dan tujuan dari Direktorat jendral pajak yang memberikan aplikasi e-SPT PPN, kepada wajib pajak yaitu agar Wajib pajak Merasa dimudahkan dalam pelaporan SPT PPN nya.

Penerapan system *Prepopulated* data pajak, serta aplikasi e- SPT masa PPN, diharapkan dapat membuat pengisian serta pelaporan PPN, menjadi lebih efisien dan lebih mudah bagi wajib pajak, dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dengan adanya system dan aplikasi ini, KPP merasa ada peningkatan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Dan wajib pajak merasa lebih dimudahkan dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya, dihematkan biayanya, serta cepat dalam perhitungannya dan sangat akurat, datanyapun lebih terjamin amannya,serta berkurangnya kesalahan dalam meng 26 n data-data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan e- SPT Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar 35 pada KPP Pratama Bulukumba”.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah, Bagaimana Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan e- SPT 9 Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba?

2. 10 INJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang No.28 tahun 2007, pasal 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa, Pajak adalah “Kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh Negara yang terutang, baik orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan yang akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan Negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

6 Mardiasmo (2018), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi), dan akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum Negara.

Dari Definisi diatas, maka dapat diuraikan beberapa unsur dari pajak, antara lain:

- 47 a) Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara, dan yang berhak memungut pajak adalah Negara sendiri. Dan keuntungannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
- b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan disepakati. Sifat pemungutannya dipaksakan berdasarkan kewenangan sesuai aturan pelaksanaann 23
- c) Tidak ada kontraprestasi (tidak mendapat jasa timbal balik) secara langsung oleh pemerin 23 dalam pembayaran pajak.
- d) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Berdasarkan beberapa definisi dan unsur dari pajak, yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk kas Negara, sebagai suatu instrumen yang legal, yang akan digunakan oleh pemerintah, yang diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, dengan menjadi wajib pajak yang patuh, akan sangat mempengaruhi perekonomian negara kita ini.

2.2 System Prepopulated Data Pajak Masukan

Fitur *prepopulated* adalah fitur tambahan pada aplikasi e-faktur desktop, yang tidak menghilangkan fungsi *Key-in* atau mekanisme impor data CSV (*file comma separated values*) yaitu file teks yang berisi daftar data.

Prepopulated pajak masukan adalah, system dimana DJP yang akan menyediakan dan mempersiapkan data pajak masukan yang dimiliki oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak), yang berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Dan dengan adanya fitur baru ini, yaitu fitur *Prepopulated* data pajak masukan ini, PKP tidak perlu memasukan data pajaknya secara manual. Dengan begitu, system ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan pengimputan data, misalnya seperti, data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pada aplikasi sebelumnya, yakni aplikasi e-faktur 2.0, PKP harus melakukan pengimputan data faktur pajaknya secara manual dan harus melalui skema impor atau bahkan melakukan aplikasi system *scanner* e-faktur dan dari beberapa metode diatas, dapat menyebabkan permasalahan dilapangan. Sehingga, system *Prepopulated* yang baru ini, diharapkan dapat mengatasi serta menyelesaikan masalah-masalah yang akan timbul karna kekurangan dari system pajak sebelumnya dan adapun Informasi data yang tersaji dalam system *Prepopulated*, yakni:

- 1) *Prepopulated* Pemberitahuan Import Barang (PIB)
- 2) *Prepopulated* Data Pajak Masukan (PM)
- 3) *Prepopulated* VAT (*Value Added Tax*)

Refund.

- 4) *Prepopulated* SPT Masa PPN.

Fitur *Prepopulated* data pajak memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- 1) Membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Masa PPN dengan lengkap, benar, dan jelas. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan input, yang dapat merugikan hak-hak dari wajib pajak.
- 2) Dalam pembuatan faktur pajak serta Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dapat saling terhubung.
- 3) Dengan adanya system pembaharuan pada aplikasi e-faktur ini, dapat meningkatkan kemudahan pelayanan kepada PKP. Serta dapat memudahkan wajib pajak dalam mengotomatisasi pengisian data pajak.
- 4) Data pajak yang menggunakan fitur ini, akan dijamin keamanannya, karena telah divalidasi oleh pihak otoritas, sehingga WP tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak resmi.
- 5) Proses Administrasi pelaporan SPT masa PPN, menjadi lebih sederhana.

2.3 Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Dalam mewujudkan system administrasi perpajakan yang modern, pemerintah, yang dimaksud disini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak, untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

Liberti Pandiangan (2018) menjelaskan bahwa yang dimaksud e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP, secara elektronik dengan menggunakan media computer. Sedangkan menurut DJP, e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital yang dilaporkan secara elektronik dan menggunakan media computer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses kerja dari e-SPT yaitu, data-data yang telah diterima dan telah divalidasi ditempat pelayanan terpadu, akan segera ditransferkan dalam system informasi DJP. Maka datanya secara otomatis akan dibukukan, tentunya dengan menggunakan rekening wajib pajak yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi DJP, mengambil kebijakan melakukan migrasi, yaitu dari penyampaian SPT dengan menggunakan media kertas, menuju elektronik, yaitu:

- Besarnya tingkat kesalahan dalam proses perekaman SPT, yang disampaikan secara *Hard copy* (secara manual menggunakan kertas).
- Volume kegiatan bisnis wajib pajak yang semakin meningkat menjadikan sangat tidak efektif dan efisien.
- Proses dari perekaman data secara manual, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan semakin berkembangnya teknologi informasi.

a. Keuntungan Aplikasi System e-SPT

- Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik. System aplikasi e-spt dapat mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- Mempermudah dalam perhitungan SPT. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kesistem operator hanya akan diinput dengan aplikasi e-SPT. Dan system e-SPT yang akan melakukan perhitungan perpajakan dengan kompleks dan mudah serta akurat.
- Mudah dalam pembuatan laporan perpajakan. Hasil data yang telah dilakukan oleh operator (*Operator Entry*) dapat dengan mudah dicetak laporan SPTnya hanya dengan beberapa langkah.
- Mudah dan efisien dalam melaporkan pajaknya. System aplikasi e-SPT ini memiliki kemampuan untuk membuat SPT dalam bentuk penyimpanan format tertentu, sehingga memudahkan dalam pelaporan SPT ke kantor pajak. (Tidak perlu membuat laporan secara bertumpuk-tumpuk), dan

dijamin keamanannya.

b. Kelemahan Aplikasi Sistem e-SPT

- Aplikasi e-SPT ini memerlukan *Updating* disetiap ada perubahan peraturan perpajakan. Disebabkan karena peraturan pelaksanaan undang-undang sering diubah, bahkan mengalami perubahan peraturandalam setiap masa pajak. maka aplikasi e- SPT ini harus diubah pula mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan.
- Aplikasi e-SPT sangat Sensitif terhadap kondisi computer yang akan digunakan. Sebab, computer yang operasi sistemnya tidak *compatible* dengan aplikasi e-SPT, maka tidak dapat dijalankan dengan baik.
- Internet sangat rentan dengan virus, yang mengakibatkan hilangnya semua data-data.
- Tidak efisien, karena walaupun wajib pajak telah mendapat izin untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT, namun SPT induknya tetap harus dilaporkan dalam bentuk aslinya.
- Pengguna komputer dan internet masih belum populer dikalangan masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah (selain kota besar di indonesia), sehingga perlu waktu untuk mengsosialisasikannya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian deskriptif, ialah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat.

Penelitian deskriptif berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak data-data penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena dengan spesifik dan urut.

Untuk mendapatkan data dan informasi untuk kepentingan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a) *Observasi*

Teknik ini merupakan teknik pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan kunjungan secara langsung dilapangan, guna agar masalah-masalah yang menjadi objek penelitian dapat terselesaikan.

b) *Interview/ wawancara*

Teknik ini, adalah teknik yang melakukan Tanya jawab secara langsung kepada kepala seksi dan staf-staf pegawai, yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c) *Dokumentasi*

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun fil. Sehingga studi dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen seperti catatan harian, transkrip, surat kabar, buku dan media cetak lainnya. Selain itu juga bisa didapat dari film atau foto.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian penulis, yaitu ingin mengetahui penerapan *Prepopulated* data pajak masukan dan e-SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara penelitian lapangan, dan mengakses *wepsite* atau situs-situs terkait masalah yang diteliti. Perlu diketahui sistem *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan e-SPT masa PPN, merupakan suatu metode atau cara penyampaian secara Elektronik yang dilakukan secara *Online* dan *Real Time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Langkah surat Pemberitahuan Masa PPN oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak

dan atau pelunasan pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotongan atau pemungutan pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

a. Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan yang Terdaftar menggunakan system e-SPT masa diKPP Pratama Bulukumba

Menurut UU PPh, Wajib Pajak Badan (WPB) adalah, pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN setiap bulannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.45/PJ/2010 menerangkan bahwa SPT masa PPN dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh Wajib Pajak.

Berikut data Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan dirinya dan melaporkan dirinya dengan menggunakan aplikasi atau fitur e-SPT masa PPN diKPP Pratama Bulukumba :

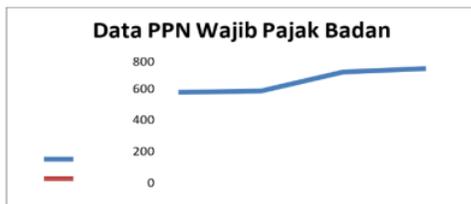
Tabel 3.1
Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan yang Terdaftar menggunakan system e-SPT masa diKPP Pratama Bulukumba.

Data Wajib Pajak Badan		
Tahun	Laporan	
	e-SPT	Manual
2018	363	0
2019	375	0
2020	557	0
2021 (s.d. 30 08 2021)	590	0

(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita ketahui laju dari pertumbuhan wajib pajak badan yang melaporkan PPNnya dari tahun 2018 ke tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa, pada tahun pajak 2018 tingkat pelaporan wajib pajak badan sejumlah 363 WPB. Pada tahun 2019 pelapor wajib pajak badan mengalami kenaikan, menjadi 375 wajib pajak. Ditahun 2020 wajib pajak badan yang melaporkan PPNnya mengalami kenaikan kembali, yaitu sebanyak 557. Pada tahun 2021 pelaporan wajib pajak mengalami kenaikan yaitu sebanyak 590 wajib pajak badan.

9 **Gambar 3.1**
Data PPN Wajib Pajak Badan



(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Jadi, total keseluruhan Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan PPNnya adalah sebanyak, 1913 Wajib Pajak Badan. Berdasarkan grafik diatas jumlah wajib pajak badan yang melaporkan pajak penghasilannya,

dan pada setiap tahunnya selalu meningkat. Dapat dilihat mulai tahun 2018 ke tahun 2021, pelaporan PPN selalu mengalami kenaikan.

4.2 Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan e-SPT masa PPN yang Terdaftar diKPP Pratama Bulukumba

Fitur *prepopulated* adalah fitur tambahan pada aplikasi e-faktur desktop, yang tidak menghilangkan fungsi *Key-in* atau mekanisme impor data CSV (*file comma separated values*) yaitu file teks yang berisi daftar data. *Prepopulated* pajak masukan adalah, system dimana DJP yang akan menyediakan dan mempersiapkan data pajak masukan yang dimiliki oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak), yang berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Dan dengan adanya fitur baru ini, yaitu fitur *Prepopulated* data pajak masukan ini, PKP tidak perlu memasukan data pajaknya secara manual. Dengan begitu, system ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan pengimputan data.

Berikut merupakan data *Prepopulated* pajak masukan dan e-SPT yang terdaftar diKPP Pratama Bulukumba:

Tabel 3.2

Data *Prepopulated* Pajak Masukan dan e-SPT masa PPN

Data Laporan		
Tahun	Lapor	
	<i>Prepopulated</i> - e-SPT	Manual
2018	3.073	0
2019	3.115	0
2020	3.575	0
2021 (s.d. 30 08 2021)	3.985	0

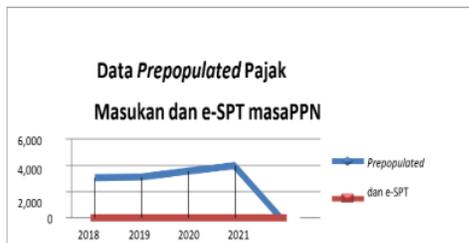
(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Tabel diatas merupakan jumlah wajib pajak yang menyelesaikan melaporkan pajaknya dengan menggunakan system *Prepopulated* pajak masukan dan e-SPT masa PPN pada tahun 2018 hingga 2021. Dapat kita

lihat, ¹⁵ hwa pada setiap tahunnya penggunaan fitur *Prepopulated* pajak masukan dan e-SPT masa PPN, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 3.073 Wajib pajak badan, dan tahun 2019 menjadi 3.115 wajib pajak badan.

Tahun 2020 sampai 2021, mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2020 sebanyak 3.575 wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya dengan menggunakan fitur *Prepopulated* data Pajak. Dan tahun 2021 menjadi 3985 wajib pajak badan.

Gambar 3.2
Data Prepopulated Pajak Masukan dan e-SPT



(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Berdasarkan grafik diatas jumlah wajib pajak badan yang menyelesaikan melaporkan pajaknya dengan menggunakan fitur *Prepopulated* data dan e-SPT masa PPN, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya menggunakan fitur *Prepopulated* data pajak masukan dan e-SPT masa PPN sudah memenuhi target. Dan berdasarkan responden dari wajib pajak badan dengan diterapkannya *Prepopulated* data pajak masukan dan e-SPT masa PPN sangat Efektif diKPP Pratama Bulukumba.

Diperkuat lagi dengan mengutip hasil wawancara yang merupakan tanggapan dari salah satu pegawai KPP Pratama Bulukumba, yang menyatakan bahwa:

“Alasan utama wajib pajak badan menggunakan sistem *Prepopulated* Data Pajak Masukan, karena mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan, yang mana proses pelaporan secara online

ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu tidak hanya memudahkan wajib pajak dengan *Prepopulated*-nya, e-Faktur Online Pajak juga memberikan solusi untuk membantu dalam pengelolaan faktur pajak menjadi lebih baik. Mulai dari membuat dan menerbitkan *invoice* serta faktur pajak, menghitung PPN secara otomatis, mengelola nota retur faktur pajak (masukan dan keluaran), hingga menyampaikan SPT Masa PPN”.

Selain itu, wajib pajak yang menggunakan fitur atau sistem ini, dapat ¹ memasukkan faktur pajaknya hanya menggunakan QR, Barcode Scanner, Menggunakan faktur pajak dalam jumlah banyak dalam 1 klik, memvalidasi NPWP lawan transaksi, aplikasi NSFP secara otomatis migrasi dari e-Faktur Desktop dengan mudah, rekonsiliasi PPN, dan lainnya. Dan juga kita dapat melihat fitur, paket, serta harga lengkapnya yang sesuai dengan kebutuhan kita disini. Wawancara dengan Narasumber yaitu N.a.d.

b. Cara penggunaan ³¹ *Prepopulated* PPN Pajak Masukan e-Faktur 3.0

Aplikasi e-Faktur versi 3.0 merupakan peremajaan dan pengembangan dari aplikasi 2.2. Aplikasi ⁵¹ ini membawa beberapa penambahan fitur baru seperti *Prepopulated* Data Pajak Masukan, *Prepopulated* Data Pemberitahuan Impor Barang, *Prepopulated* VAT Refund dan Sinkronisasi kode Cap.

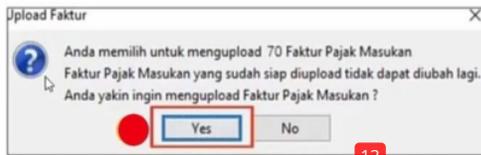
Dengan adanya *Prepopulated* pajak masukan ini, aplikasi e-faktur dan sarana pelaporannya, sudah tidak lagi menggunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online, melainkan menggunakan e-Faktur web based yang sudah terhubung dengan aplikasi e-Faktur. Dengan begitu ketika Wajib Pajak akan melakukan pelaporan pajak SPT akan keluar dengan data pajak yang telah diinput oleh Wajib Pajak sebelumnya di aplikasi e-Faktur.

Adapun cara penggunaan *Prepopulated* PPN Pajak Masukan adalah ⁴⁷ sebagai berikut:

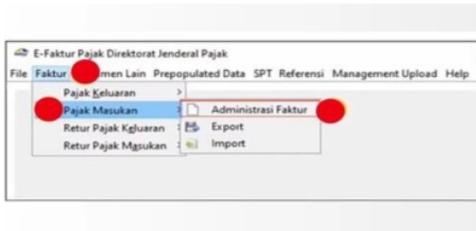
- Instal aplikasi yang menggunakan fitur *Prepopulated* data PPN di e- Faktur 3.0.

Gambar 3.8
Tampilan menu konfirmasi

Berikutnya akan muncul informasi sebagai berikut:

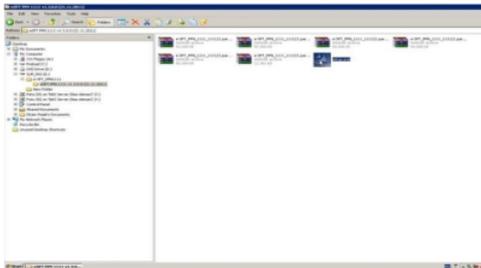


- Cek hasil *upload prepopulated data faktur pajak masukan* dengancara masuk ke menu → pajak masukan → administrasi faktur.



Gambar 3.9 Menu cek hasil *Upload*

- Setelah rangkaian proses1-10 dilakukan, SPT Masa PPN siap dilaporkan.



4.2 Pembahasan

Tujuan Direktorat Jendral Pajak atau yang sering kita sebut dengan DJP menyediakan fasilitas *Prepopulated* data pajak masukan dan e-SPT Masa PPN ini adalah, untuk lebih memberikan layanan kepada Masyarakat wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Dan dengan pemanfaatan teknologi, yang secara keseluruhan cenderung berbiaya lebih murah dan dengan proses yang lebih cepat. Karena wajib pajak dapat merekam sendiri surat pemberituannya sehingga

bisa lebih akurat, efisien, dan efektif.

Selain itu juga fitur atau sistem ini dapat mengotomatisasi dalam pengisian pajak, sehingga dalam penyampaian menjadi lebih lengkap, jelas, dan benar. Keunggulan dengan adanya sistem *Prepopulated* data pajak masukan dan e-SPT masa PPN difitur e-Faktur ini, sebelumnya sistem yang digunakan adalah sistem manual untuk menarik data dan harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kecustomer, dan setelah adanya fitur ini, tidak perlu lagi mengkonfirmasi kecustomernya, jadi kita hanya perlu menarik data pada sistem dan akan muncul secara langsung semua data-data yang kita butuhkan. Dan untuk Pajak masukan dengan mudah akan dikreditkan tanpa menunggu faktur fisiknya. Dan juga dapat meningkatkan wajib pajak yang akan menyelesaikan dalam pelaporan pajaknya.

Hal ini dapat kita lihat dari data yang telah penulis peroleh dari hasil penelitian, dimana setiap tahunnya Wajib Pajak Badan yang melaporkan PPNnya selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sampai tahun 2021 yang melaporkan PPN nya adalah sebanyak 1913 PKP.

Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 total wajib pajak yang menyelesaikan melaporkan pajaknya dengan menggunakan fitur *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan e-SPT Masa PPN adalah sebanyak 13.748 Wajib Pajak Badan.

Bukan hanya itu saja, dengan adanya sistem ini, maka dapat membantu wajib pajak dalam mengurangi resiko kekeliruan data yang akan dilaporkan, serta dapat membantu Wajib Pajak untuk kepatuhan pelaporan pajaknya, sebab tidak terlalu lama di terima oleh lawan transaksinya, dengan begitu maka akan membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaporan pajak dengan menggunakan sistem *Prepopulated* data dan e-SPT Masa PPN tergolong kedalam kriteria efektif, yang telah diterapkan di KPP PRATAMA BULUKUMBA. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaporan wajib pajak badan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
2. Penerapan *Prepopulated* pajak masukan dan e-SPT masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP PRATAMA BULUKUMBA.
3. Dengan adanya sistem terbaru yang diciptakan oleh DJP ini, maka lebih memudahkan wajib pajak badan dalam proses pelaporan pajak. Sebab dengan adanya fitur ini, maka tingkat kesalahan yang ditimbulkan lebih sedikit atau lebih kecil.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dengan adanya penerapan program *Prepopulated* data pajak dan e-SPT Masa PPN, maka diharapkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak beserta kantor Wilayahnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik kedepannya. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan mengenai pentingnya membayar pajak.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memacu peningkatan pelaporan pajak, mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terbesar.
3. Pemerintah harus mendukung program-program yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak, serta bekerja sama dengan Kantor Pelayanan

Pajak (KPP), khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani. 2017. *Akuntansi Pajak, Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba*. KPP Bulukumba, Jakarta.
- Alim, Seiadi. 2018. *e-SPT Tahunan PPh Badan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Handayani, Kadek. 2013. *E-Jurnal Akutansi. Pengaruh Efektifitas e-SPT masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat*. Bali: Universitas Udayana.
- Jakijan dan Khairani. 2013. *Analisis Aplikasi E-Spt Ppn Pada Kantor Konsultan Pajak Madya Palembang*. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*. 2004. Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Andi, Yogyakarta.
- Permata, Indah. 2016. *Jurnal Perpajakan (JEJAK). Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Pratama Baru.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Radianto, ED Wirawan. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sari, Diana. 2014. *Konsep dan Teori Aplikasi Pajak Penghasilan*, Edisi Pertama, Mitrawacanamedia. Bekasi Jawa Barat.
- Sakti dan Hidayat, 2015:123. *Faktur Pajak Elektronik atau yang biasa di sebut e-Faktur adalah faktur pajak yang di buat dengan melalu aplikasi atau sistem elektronik yang di tentukan atau yang di sediakan Direktorat Jenderal Pajak*.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*, Edisi 7, Salemba Empat. Jagakarsa, Jakarta

Selatan.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1, Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2, Salemba Empat. Jakarta.

(www.news.ddtc.co.id/apa-itu-prepopulated-pajak-masukan-/21Mei2021/16.15)

(www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn/23.2021/14.23)

(www.mas-software.com/blog/e-spt/_23.Mei.2021/23.15)

(www.cpssoft.com/blog/pajak/pengelompokan-dan-jenis-pajak-di-indonesia/09.july.2021/20.06)

(www.pajak.go.id/artikel/elektronik-spt/12.july.2021/05.09)

Implementation Of Input Tax Prepopulated Data And Vat E-Spt In Increasing Value Added Tax Reporting Agency Tax Registered At Kpp Pratama Bulukumba

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.blogarama.com Internet Source	1%
2	id.wikipedia.org Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	<1%
4	www.wibowopajak.com Internet Source	<1%
5	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
6	repository.ump.ac.id Internet Source	<1%
7	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1%
8	news.ddtc.co.id Internet Source	<1%

9	Nindita Dwi Marlyanti, Aristha Purwanthari Sawitri. "Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2020 Publication	<1 %
10	alvindayu.com Internet Source	<1 %
11	batam.tribunnews.com Internet Source	<1 %
12	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
13	goenhans.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
15	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
16	tirto.id Internet Source	<1 %
17	wahyo.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Pasundan University Student Paper	<1 %
19	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %

20	www.gatra.com Internet Source	<1 %
21	jom.untidar.ac.id Internet Source	<1 %
22	journal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
23	Siska Lovihan. "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Publication	<1 %
24	aanzainalarifin.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	repo.usni.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
27	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
28	akrabjuara.com Internet Source	<1 %

feb.untagsmg.ac.id

29

Internet Source

<1 %

30

repository.mercubuana.ac.id

Internet Source

<1 %

31

www.online-pajak.com

Internet Source

<1 %

32

www.rumahpajak.com

Internet Source

<1 %

33

www.soalku.com

Internet Source

<1 %

34

Sunarto Sunarto, Yuyuk Liana. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2020

Publication

<1 %

35

anurlita.wordpress.com

Internet Source

<1 %

36

drpm.umsida.ac.id

Internet Source

<1 %

37

eprints.unram.ac.id

Internet Source

<1 %

38

fuzinoviyanti.wordpress.com

Internet Source

<1 %

idr.uin-antasari.ac.id

39	Internet Source	<1 %
40	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
41	klikpajak.id Internet Source	<1 %
42	ortax.org Internet Source	<1 %
43	repositorio.ug.edu.ec Internet Source	<1 %
44	www.sagafgresik.com Internet Source	<1 %
45	Sugiono Ruslan. "Rekonstruksi Rumah Majapahit di Desa Bejijong Sebagai Sarana Edukasi Pendidikan IPS", Gulawentah:Jurnal Studi Sosial, 2019 Publication	<1 %
46	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
47	ejournal.iaisyarifuddin.ac.id Internet Source	<1 %
48	fitri-berbagiilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	repository.ubb.ac.id Internet Source	<1 %

50	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
51	ubgu.lefategiardiniere.it Internet Source	<1 %
52	www.jurnalekonomi.unisla.ac.id Internet Source	<1 %
53	Debyta Ayu Umi Hani, Imahda Khori Furqon. "PENGARUH SANKSI PAJAK SERTA PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK", UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, 2021 Publication	<1 %
54	dspace.uphsurabaya.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
55	ecampus.sttind.ac.id Internet Source	<1 %
56	ejournals.umma.ac.id Internet Source	<1 %
57	journals.ums.ac.id Internet Source	<1 %
58	jppipa.unram.ac.id Internet Source	<1 %
59	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %

60

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

61

uniflor.ac.id

Internet Source

<1 %

62

www.mantri-suster.co.cc

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On